

**ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN
WARGA TRANSMIGRAN SITIUNG I DAN WARGA TEMPATAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

TESIS

Oleh:

YUDHA TOPAN
BP. 06 202 004



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**

**ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN
WARGA TRANSMIGRAN SITIUNG I DAN WARGA TEMPATAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

**Oleh: YUDHA TOPAN
(Di bawah bimbingan Endry Martius dan Fuad Madarisa)**

Ringkasan

Penelitian ini merupakan penelitian survei eksploratif yang dilakukan pada Agustus-Oktober 2008 dengan menggunakan kuesioner dan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data di empat jorong yakni Koto Agung, Piruko, Sungai Duo, dan Pulai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan warga transmigran Sitiung I serta warga tempatan di Kabupaten Dharmasraya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan kedua kelompok masyarakat tersebut.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pendapatan warga eks transmigran lebih tinggi dibanding pendapatan warga tempatan, dimana pendapatan warga eks transmigran selama setahun (Juni 2007-Juni 2008) adalah Rp25.051.621 dengan pendapatan per kapita adalah Rp7.261.339 sedangkan pendapatan warga tempatan adalah Rp23.503.037 dengan pendapatan per kapita adalah Rp6.088.869. Selanjutnya, yang mempengaruhi tingkat pendapatan warga eks transmigran dan warga tempatan adalah jumlah aset keluarga yang dimiliki, jumlah modal keluarga yang dimiliki, adanya sarana penunjang ekonomi yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka, adanya pembinaan dari pemerintah/swasta terhadap mereka, dan adanya bantuan dari pemerintah/swasta terhadap mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan saran-saran yakni 1) peningkatan pendapatan kedua kelompok responden dapat dilakukan dengan memudahkan mereka untuk mendapatkan akses-akses kepemilikan lahan, modal, dan sarana penunjang ekonomi yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka, dan 2) perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tinjauan dari berbagai aspek lain yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat pendapatan kedua kelompok masyarakat tersebut.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik dan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan mensejahterakan masyarakat. Konsep pembangunan merupakan suatu konsep multidimensi dalam proses menuju ke arah perbaikan dan peningkatan yang seringkali dikaitkan erat dengan konsep kemajuan (*progress*) itu sendiri dan secara fundamental mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa (Ermaya, 2006). Walaupun banyak terdapat rumusan tentang kesejahteraan, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa taraf hidup atau kesejahteraan akan meningkat apabila semakin banyak kebutuhan dapat dipenuhi.

Karena itu, perubahan dalam proses pembangunan masyarakat juga dapat berarti sebagai perubahan yang mengarah pada kondisi yang memungkinkan semakin banyak kebutuhan dapat dipenuhi. Agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, sangat tergantung pada tingkat pendapatan. Oleh karena itu yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatnya taraf hidup dan memenuhi kebutuhan pokok, menghapuskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan (Soetomo, 2006).

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi kenyataan masih adanya kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan

rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada umumnya di negara berkembang, masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan (Suhardjo, 1997).

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan ke depan adalah bagaimana mewujudkan kemerdekaan bangsa yang hakiki, yakni bangsa yang mampu membangun kemandirian di berbagai bidang kehidupan. Sebab, wujud kemandirian bangsa adalah apabila bangsa itu mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan bersama. Karena itu, persoalan kemiskinan yang kini masih melilit bangsa ini menjadi tanggung jawab bersama agar kita lebih bijak mengelola potensi sumber daya yang tersedia.

Untuk mewujudkan visi kesejahteraan, modal terbesar yang dimiliki bangsa ini ada dua. Pertama, jumlah penduduk yang banyak, lebih dari 200 juta jiwa. Kedua, sumber daya alam berupa potensi lahan pertanian dan kelautan beserta kandungan di dalamnya. Karenanya, pembahasan untuk mengentaskan kemiskinan bangsa ini tidak bisa lepas dari bagaimana mengelola dua potensi bangsa itu secara terintegrasi dan sistemik.

Selama Orde Baru hingga kini, dinamika kependudukan di Indonesia secara umum masih mengikuti pola lama dengan tiga masalah pokok, yakni jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, dan distribusi penduduk yang tidak merata. Akibatnya, banyak aspek yang telah menunjukkan *on the right track*, misalnya penurunan angka kelahiran, angka kematian bayi, dan angka

harapan hidup. Data terakhir menunjukkan bahwa kondisi kependudukan Indonesia masih lebih buruk dibandingkan dengan negara tetangga (Faturachman dkk, 2004).

Implikasi nondemografis terhadap distribusi penduduk yang tidak merata tersebut menurut Faturachman dkk (2004) adalah munculnya persoalan daya dukung lingkungan. Jumlah penduduk yang sangat besar di Jawa dan Bali telah menyebabkan daya dukung lingkungan di wilayah ini semakin menurun. Meskipun persoalan tersebut bukan hal baru, saat ini situasinya semakin kritis sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Bencana alam yang semakin sering terjadi, misalnya banjir, tanah longsor, dan pencemaran lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk.

Dalam teori Malthus, faktor jumlah penduduk yang berlebih (*over population*) dianggap sebagai faktor penting yang menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengendalikan jumlah penduduk merupakan salah satu upaya untuk menekan atau mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan konsep dasar kebijakan kependudukan bahwa meskipun sasaran penting kebijakan tersebut adalah untuk mempengaruhi dinamika penduduk, *out put* akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pemahaman tersebut, menurut Faturachman dkk (2004) kebijakan kependudukan di Indonesia selama ini secara tidak langsung telah ikut mempengaruhi perubahan tingkat kemiskinan.

Selain itu, masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berarti masih tetap tinggi pula pertumbuhan angkatan kerja. Diperkirakan pertumbuhan

angkatan kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk oleh karena struktur umur penduduk yang relatif muda. Hal ini berarti banyak tenaga kerja yang berusia muda dan umumnya kurang atau belum terampil dan kurang pengalaman. Selain itu masalah kependudukan yang belum merata juga ditandai oleh adanya ketidakseimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumber daya alam yang tersedia.

Sementara itu, Soetomo (2006) mengatakan pada umumnya dibandingkan negara-negara telah berkembang, kondisi sosial ekonomi negara-negara sedang berkembang berada pada tingkat yang lebih rendah. Oleh sebab itu, di kalangan negara-negara sedang berkembang tersebut banyak dilakukan usaha untuk mengejar ketertinggalannya. Salah satu bentuknya adalah melalui proses perubahan sosial terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai pembangunan masyarakat. Berbagai kebijakan dielaborasi untuk mengejar ketertinggalan terutama bagi masyarakat yang ada di pedesaan.

Oleh sebab itu, program yang semakin banyak mengintegrasikan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat desa ini kemudian lebih populer disebut sebagai pembangunan desa (*rural development*). Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yakni *desi*, *dusun*, yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan nama serta memiliki batas yang jelas (Purnomo, 2004).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang memiliki cakupan yang lebih luas dibanding pembangunan pertanian tersebut, Johnston and Clark (1980) merekomendasikan adanya intervensi yang spesifik dalam tiga kawasan

program. Pertama, *production oriented intervention* yang meliputi kesempatan kerja pedesaan dan pembangunan pertanian. Kedua, *consumption oriented intervention* yang meliputi kesehatan, nutrisi, dan keluarga berencana. Ketiga, *organization oriented intervention* yang meliputi struktur institusional dan prosedur manajerial. Ketiga program tersebut ibarat tombak yang ujungnya bermata tiga atau biasa disebut trisula pembangunan desa.

Adisasmita (2006) mengemukakan pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan potensi dan kemampuan pedesaan.

Menurut Soetomo (2006) usaha pembangunan desa yang terutama bertujuan meningkatkan produktifitas dan pendapatan tersebut, tidak jarang di satu pihak menampakkan keberhasilannya secara makro apabila dilihat dari seluruh desa. Tetapi di lain pihak, sering kurang menunjukkan aspek pemerataan, dalam arti tidak meratanya distribusi peningkatan pendapatan tersebut kepada lapisan-lapisan masyarakat yang ada.

Menyadari bahwa untuk menyukseskan proses pembangunan desa sangat terkait dengan persoalan pemerataan penduduk, sejak era 1950-an pemerintahan Orde Baru menyelenggarakan program transmigrasi untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus sebagai upaya pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan. Pasalnya, terutama di kawasan pedesaan di Pulau Jawa, terbatasnya lahan dan semakin banyaknya jumlah penduduk membuat semakin kecilnya peluang masyarakat untuk mencapai hidup sejahtera.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Tingkat Pendapatan Warga Eks Transmigran Sitiung I dan Warga Tempatan

Pendapatan warga eks transmigran lebih tinggi dibanding pendapatan warga tempatan, dimana pendapatan warga eks transmigran selama setahun (Juni 2007-Juni 2008) adalah Rp25.051.621 dengan pendapatan per kapita adalah Rp7.261.339 sedangkan pendapatan warga tempatan adalah Rp23.503.037 dengan pendapatan per kapita adalah Rp6.088.869.

5.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Responden

Dari kondisi sosio demografi dan penguasaan sumber daya ekonomi warga transmigran Sitiung I dan warga tempatan, ternyata terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan mereka. Pada warga eks trans, tingkat pendapatan dipengaruhi oleh usia kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, jumlah aset keluarga yang dimiliki, modal keluarga yang dimiliki, adanya sarana penunjang ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, adanya pembinaan dari pemerintah/swasta, dan adanya bantuan dari pemerintah/swasta. Dengan kata lain, tingkat pendapatan warga eks trans tidak dipengaruhi oleh pekerjaan sampingan, kondisi kesehatan keluarga, kebiasaan pribadi, dan jumlah alat pertanian yang dimiliki.

Adapun pada warga tempatan, tingkat pendapatan dipengaruhi oleh adanya pekerjaan sampingan keluarga, kondisi kesehatan keluarga, kebiasaan pribadi yakni kebiasaan menabung dan jumlah jam kerja, jumlah aset keluarga yang dimiliki, jumlah modal keluarga yang dimiliki, jumlah alsintan yang dimiliki, adanya sarana penunjang ekonomi yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka, adanya pembinaan dari pemerintah/swasta terhadap mereka, dan adanya bantuan dari pemerintah/swasta terhadap mereka. Sehingga, faktor-faktor usia kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, dan jumlah tanggungan keluarga.

Meski demikian, terdapat lima faktor yang sama-sama mempengaruhi tingkat pendapatan kedua kelompok responden yakni jumlah aset keluarga yang dimiliki, jumlah modal keluarga yang dimiliki, adanya sarana penunjang ekonomi yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka, adanya pembinaan dari pemerintah/swasta terhadap mereka, dan adanya bantuan dari pemerintah/swasta terhadap mereka.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan kedua kelompok responden dapat dilakukan dengan memudahkan mereka untuk mendapatkan akses-akses kepemilikan lahan, modal, sarana penunjang ekonomi yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka, serta pembinaan dan bantuan dari pemerintah/swasta.
2. Guna mendalami permasalahan disparitas pendapatan warga eks transmigran Sitiung I dan warga tempatan serta berbagai upaya

penanggulangannya, perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan tinjauan dari berbagai aspek lain yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat pendapatan kedua kelompok masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif Graha Ilmu*, Yogyakarta.
- Adnyana, M O, Sumaryanto, M. Rachmat, R. Kustiari, SH, Susilowati, E. Suryani and Suprpto. 2000. *Assesing the Rural Development Impact of the Crisis in Indonesia*. CASER, Bogor, Indonesia and The World Bank, Washington D.C.
- Agustar, Asdi. 1996. *Sustainability of Food and Nutrition Diversification Project in West Sumatera Indonesia. Dissertation*. Tidak dipublikasikan. Los Banos, Philipines.
- Aguzzi. 2000. *Analisa Regresi, Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi II. BPSE Yogyakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 1984. *Konsumsi Penduduk Indonesia*. Jakarta
- _____. 1996. *Statistik Indonesia. Kemiskinan* Jakarta
- _____. 2001. *Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Jakarta.
- _____. 2006. *Pendapatan per Kapita Indonesia 2005*. Jakarta.
- _____. 2007. *Produk Domestik Regional Bruto Indonesia*. Jakarta.
- _____. 2007. *Kecamatan Sitiung dalam Angka 2006*. Dharmasraya.
- _____. 2007. *Dharmasraya dalam Angka 2006*. Dharmasraya.
- _____. 2008. *Sumatera Barat dalam Angka 2007*. Padang.
- Alwan, Zaki. 1992. *Intermediate Accounting*. Edisi ke-3. Jilid 1. BPFU-UGM, Yogyakarta.
- Anger, H.P. and J. Braun. 1991. *Technological Change and Commercialization in Agriculture: The Effect on the Poor*. World Bank Research Observer.
- _____. 2006. *Potensi Dana Swadaya Sebagai Sumber Pendanaan Pengembangan Usaha Di Permukiman Transmigrasi*. Artikel tidak diterbitkan.